



# Supporting Factors in the Implementation of Smart Governance through E-Performance of the Regional Civil Service Agency of Sidoarjo Regency

## Faktor Pendukung Penerapan *Smart Governance* melalui E-Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo

Zachiyatul Chiqmah\*, Ilmi Usrotin Choiriyah

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

### ABSTRACT

The availability of adequate resources, regulations, budget funds, facilities and infrastructure is an important component in the implementation of e-government. The government is required to provide quality services to the community to create goals in improving the welfare of the community. One effort to improve government performance is through smart city. One of the applications of smart city in the government is realized by E-Kinerja conducted by the Sidoarjo Regency Regional Civil Service Agency. In its application there are still problems including the lack of ability of human resources (HR) apparatus caused by age, low desire to learn technology, and low levels of education. The purpose of this study is to explain and analyze the Implementation of Smart Governance through E-Kinerja in the Sidoarjo Regency Regional Civil Service Agency. This type of research is a qualitative descriptive study. Data collection techniques in this study used observation, interviews and documentation. Data analysis techniques in this study used data collection, data reduction, data presentation and data verification. The results of this study indicate that the supporting factors in the implementation of E-Kinerja in the Sidoarjo Regency Personnel Agency, (1) telecommunications infrastructure, are adequate because they are equipped with e-performance applications that can be accessed via private mobile phones of each civil servant. (2) the availability of funds and budget for the implementation of e-performance applications funded by the Sidoarjo Regency Regional Budget. (3) written legal instruments regarding the application of e-performance.

**Keywords:** e-Government, smart governance, implementation of e-government, E-Performance

### OPEN ACCESS

ISSN 2338-445X (online)  
ISSN 2527-9246 (print)

*Edited by:*

Isnaini Rodiyah

*Reviewed by:*

Sri Maryuni and Gede Sandiasa

*\*Correspondence:*

Zachiyatul Chiqmah  
zachiyatulchiqm@umsida.ac.id

*Published:* 29 Maret 2019

*Citation:*

Chiqmah & Choiriyah (2019)  
*Supporting Factors in the Implementation of Smart Governance through E-Performance of the Regional Civil Service Agency of Sidoarjo Regency.*

JKMP (*Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*). 7:1.  
doi: 10.21070/jkmp.v7i1.1700

### PENDAHULUAN

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi menjadi solusi dalam meningkatkan kinerja pemerintah dengan memanfaatkan penyelenggaraan pemerintah, memenuhi kebutuhan masyarakat yang transparansi dan akuntabilitas yang berbasis good governance. Dengan adanya kesiapan sumber daya, regulasi, anggaran dana, sarana dan prasarana yang memadai sebagai hal yang harus ada dalam menyelenggarakan e-government. E-government atau pemerintahan elektronik sudah terlebih dahulu diterapkan di negara-negara maju. Demikian pula di terapkan di Indonesia yang tergolong sebagai negara berkembang.

Salah satu Daerah yang menerapkan yaitu Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan di bidang kepegawaian Kabupaten Sidoarjo dituntut untuk mampu mewujudkan pengelolaan manajemen kepegawaian khususnya yang berada di Kabupaten Sidoarjo salah satunya yaitu pengusulan Manajemen Kinerja Pegawai ASN secara optimal dalam mewujudkan SDM aparatur yang professional. Serta PP RI No 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil [4] dan Perka BKN No 1 Tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil.

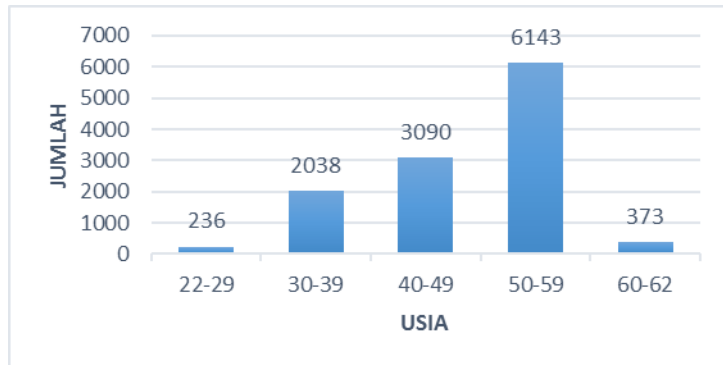
Program smart city diartikan sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, infrastruktur telekomunikasi modern dan modal sosial untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ada 6 (enam) dimensi dalam smart city yaitu smart economy, smart mobility, smart governance, smart people, smart living, dan smart environment. Dari 6 (enam) dimensi tersebut dalam penerapannya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo memfokuskan pada salah satu dimensi yaitu smart governance.

Smart governance adalah suatu langkah yang antisipatif, objektif, menciptakan sesuatu yang baru, dan bersaing dalam usaha untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan memberi pelayanan publik. Dalam hal ini smart governance ditekankan pada salah satu aktor pembangunan yang disebut pemerintah. Salah satu OPD yang menjalankan smart governance adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yang telah menerapkan aplikasi yang bernama E-Kinerja. Aplikasi E-Kinerja bertujuan untuk mengukur dan melaporkan kinerja pegawai pada suatu sistem yang terkoneksi melalui teknologi yang lebih canggih yang dinamakan elektronik kinerja, sehingga membantu seluruh PNS yang berada di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo supaya lebih disiplin, bertanggungjawab dan dapat bekerja sesuai dengan kegiatan kerjanya masing- masing.

**Tabel 1.1**  
**Daftar PNS di Kabupaten Sidoarjo Bulan Desember 2018**

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	5190
Perempuan	6771

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, sebelum diterapkannya aplikasi E-Kinerja atau SKP online, pengukuran kinerja pegawai dalam menangani SKP tahunan dan penilaian prestasi kerja PNS dilakukan dengan cara manual yaitu menggunakan Microsoft Office Excel. Seiring dengan perkembangan zaman penilaian prestasi kerja PNS dengan cara manual sudah tidak relevan lagi. Pada saat menggunakan Microsoft Office Excel mempunyai kekurangan yaitu dalam melihat data hanya terbatas tidak bisa melihat semua data dari masing-masing orang. E-Kinerja atau SKP online telah diterapkan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dikatakan masih belum optimal dalam penerapan kebijakan e-government melalui E-Kinerja karena terdapat beberapa masalah yaitu kurangnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang tidak semuanya berusia muda banyak pula yang berusia lanjut, hal ini yang menjadi hambatan karena faktor usia biasanya enggan dan acuh untuk mempelajari bidang teknologi.



**Gambar 1. Jumlah Usia PNS di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018**

Selain itu tingkat pendidikan PNS di Kabupaten Sidoarjo tidak semua memiliki jenjang pendidikan tinggi dan mampu memahami perangkat teknologi. Seperti salah satu pegawai kebersihan di Sekolah Dasar yang tidak bisa mengakses aplikasi E-Kinerja sehingga pegawai tersebut meminta bantuan kepada pegawai TU (Tata Usaha). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan smart governance melalui e-kinerja di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan smart governance melalui e-kinerja di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Maka penulis tertarik mengambil judul “Faktor Pendukung Dalam Penerapan Smart Governance Melalui E-Kinerja (Studi kasus di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo)”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan smart governance melalui e-kinerja di Badaan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah berupa gambar dan uraian kata dari hasil wawancara yang didapatkan. Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berdasarkan filsafat post positivisme, pada kondisi alamiah peneliti sebagai teknik pengumpulan data dengan cara menggabungkan, menganalisis data yang bersifat kualitatif, dan menekankan pada makna dari pada generalisasi. Langkah-langkah dalam penelitian deskriptif kualitatif yakni fenomena yang diamati dan dijelaskan secara rinci dan ilmiah dimulai dari hal terkecil hingga yang lebih luas. Penentuan informan pada penelitian kualitatif adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penganalisan data pada penelitian ini menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan smart governance melalui e-kinerja tidak terlepas dari faktor yang dapat mendukung keberhasilan dalam penerapan e-government. Pemerintah melakukan penerapan elektronik government untuk mengetahui infrastruktur telekomunikasi, ketersediaan dana dan anggaran, serta perangkat hukum untuk mendukung suatu kebijakan yang berbasis elektronik. Adapun faktor pendukung sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam menerapkan e-government melalui E-kinerja, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

## Infrastruktur Komunikasi

Pelaksanaan infrastruktur telekomunikasi pada komputer, HP, dan jaringan menjadi faktor penting dalam penerapan e-government. Infrastruktur dijadikan penunjang utama dan sasaran untuk mengembangkan e-government yang sudah ditetapkan dan harus mempertimbangkan komunikasi yang ada di tempat tersebut. Pada BKD Kabupaten Sidoarjo infrastruktur telekomunikasinya adalah komputer dimana komputer yang tersedia di BKD sudah memadai, selain itu aplikasi e-kinerja juga bisa diakses melalui handphone dari masing-masing pegawai negeri sipil dan jaringannya juga tergantung dari setiap PNS. Serta jaringan yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo sudah memadai karena WiFi yang tersedia sudah ada di masing-masing bidang. Ibu Mahardiana Devi selaku selaku bidang pengembangan Admin SKP di BKD Sidoarjo menjelaskab bahwa faktor pendukungnya sendiri kalau infrastruktur sekarang sih rata-rata handphonenya sudah canggih jadi komputernya lemot ya tidak masalah bisa di handphone. Sama halnya dengan Bapak Handoko selaku Bidang Pengembangan sub perencanaan dan informasi ASN di BKD Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa terkait sarana dan prasarana yang mendukung e-government di Kabupaten Sidoarjo ini, sebenarnya sudah memadai, Kalau untuk masalah signal sih tergantung masing-masing kan diakses secara online, untuk server diawal-awal dulu masih lemot dan sebagainya tapi sekarang sudah diperbaiki terus dan akhirnya lancar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari hasil wawancara tersebut bahwa infrastruktur komunikasi dalam penerapan aplikasi e-kinerja di BKD Kabupaten Sidoarjo sudah memadai dan sangat memudahkan bagi para PNS yang mengaksesnya karena jaringan, komputer maupun hanphone itu tergantung dari setiap pegunannya.

## Ketersediaan Dana dan Anggaran

Tersedianya dana dan anggaran untuk pengembangan e-government harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab agar anggaran yang terbatas itu dapat dimanfaatkan secara efisien serta siklus perencanaan, pengalokasian, pemanfaatan dan evaluasi anggaran menjadi lebih baik dalam pengembangan e-government, sehingga pelaksanaan strategi untuk pencapaian tujuan strategis e-government dapat berjalan secara efektif. Penerapan e-government perlu adanya sejumlah sumber daya financial untuk membiayainya karena sebagai penunjang penerapan aplikasi e-kinerja di BKD Kabupaten Sidoarjo. Biaya penyelenggaraan aplikasi E-Kinerja anggarannya dibebankan pada APBD Kabupaten Sidoarjo, jadi pihak BKD Kabupaten Sidoarjo tidak perlu mengeluarkan dana untuk biaya penerapan aplikasi e-kinerja. Terkait ketersediaan anggaran dananya dijelaskan oleh Ibu Devi bahwa didapat pakai pihak ke 3 artinya jadi dananya itu sudah ada di anggaran tahun itu, perencanaannya sudah ada di tahun sebelumnya, realisasinya di tahun ini, tapi kalau besaran dananya itu saya kesulitan karena sudah dari tahun kemarin, jadi intinya dananya itu dari pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam menerapkan aplikasi e-kinerja di Badan Kepegawaian Daerah ini pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah menyediakan dana dan anggaran yang cukup, oleh karena itu pihak BKD sendiri tidak perlu mengeluarkan dana lagi. Jadi, pihak Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo hanya membuat aplikasi dan menerapkannya.

## Perangkat Hukum

Elektronik government terkait dengan pendistribusian data dan usaha penciptaan serta informasi dari pihak lain, dalam permasalahan keamanan data dan hak cipta. Suatu hal yang perlu dilindungi oleh UU yang berlaku. Oleh sebab itu pemerintah diwajibkan memiliki dasar hokum untuk menjamin terwujudnya sistem dalam e-government yang lebih kondusif. Terkait hal tersebut Ibu Devi selaku bidang pengembangan Admin SKP di BKD Sidoarjo menjelaskan bahwa untuk perangkat hukum dalam penerapan e-government atau aplikasi e-kinerja ini sudah tercantum seperti yang saya jelaskan tadi yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Manajemen PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang penilaian prestasi kerja PNS, itu yang mendasari penerapan aplikasi e-kinerja ini. Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam

penerapan aplikasi e-kinerja di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo sudah ada perangkat hukum yang tertulis mengenai aplikasi e-kinerja dan terkait dengan penilaian kinerja pegawai negeri sipil di Kabupaten Sidoarjo, yang mendasarinya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang penilaian prestasi kerja PNS. Adanya perangkat hukum tersebut memperkuat penerapan aplikasi e-kinerja. Sehingga program ini sudah mulai efektif sebagaimana yang diinginkan..

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian penerapan smart governance melalui e-kinerja di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, Faktor pendukung dalam menerapkan smart governane melalui e-kinerja di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu pertama, infrastruktur telekomunikasi, sudah memadai karena dilengkapi dengan aplikasi e-kinerja yang bisa di akses melalui handphone pribadi dari setiap PNS. Kedua, ketersediaan dana dan anggaran penyelenggaraan aplikasi e-kinerja yang di biyai APBD Kabupaten Sidoarjo. Ketiga, perangkat hukum secara tertulis mengenai penerapan e-kinerja. Saran yang diberikan yaitu perlu adanya optimalisasi kemampuan pegawai negeri sipil di Kabupaten Sidoarjo yang berusia 50 sampai 59 tahun dalam penggunaan aplikasi E-Kinerja.

## **PENDANAAN**

Publikasi artikel ini menggunakan dana pribadi dari penulis

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kepada civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atas dukungannya sehingga artikel kami dapat di publish di Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik

## REFERENCES

- Arikunto, S. (2000). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Cetakan Kesembilan. Jakarta: Rineka Cipta. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Nugraha, J. T. (2018). *E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman)*. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, 32-42.
- Wijaya, A. (2015). *Penerapan E-Government di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang (Inpres No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government)*. Skripsi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS.
- Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS.
- Rauf, A. (2016). *Sistem Perpustakaan Menggunakan Radio Frequency Identification (Rfid) Dengan Pendekatan Smart City (Studi Kasus: Perpustakaan Wilayah Soeman Hs Provinsi Riau)*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Manguluang, A. P. (2016). *Persiapan Kota Makassar Sebagai Smart City*. Skripsi.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Lembaga Administrasi Negara. (2006). "Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik". Jakarta: LAN.
- Lembaga Administrasi Negara. (2009). *Standar Pelayanan Publik, Langkah-langkah Penyusunan*. Jakarta: LAN.
- Maani, K. Dt. (2010). *Citizen Charter: Terobosan Baru dalam Penyelenggaraan Layanan Publik*. *Jurnal Tingkap* Vol. VI No. 2 Hal 43
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi kedua. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Miles, M. B. & Hubberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI press.
- Moleong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 100/757/OTDA Tahun 2002 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Putra, Fadhilla. (2012). *New Public Governance*. Malang: UB Press
- Ratminto & Winarsih, A.S. (2005). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Savas, E.S. (1987). "Privatization: The Key to Better Government". New Jersey: Chatam House Publisher.
- Surjadi. (2012). *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: Reifika Aditama.
- Tjiptono, F. (2000). *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Andi.

**Conflict of Interest Statement:** The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

*Copyright © 2019 Zachiyatul Chiqmah & Ilmi Usrotin Choiriyah. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.*